

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Tunisia mulai terjalin sejak tanggal 10 Januari 1964 (Rakhmat, 2014). Kemitraan keduanya terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1958, Tiongkok dan Tunisia menandatangani kesepakatan perdagangan pertama mereka dan sekaligus menjadikan Tunisia sebagai salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Sejak itu, sejumlah perjanjian perdagangan telah banyak ditandatangani oleh Beijing dan Tunisia. Bahkan, untuk memfasilitasi hubungan ekonominya yang terus berkembang, Tiongkok dan Tunisia mendirikan Komite Kerjasama Bersama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi (the Sino-Tunisian Joint Committee of Economic, Trade, and Technological Cooperation) pada tahun 1983. Selain itu, Forum Investasi dan Perdagangan Tiongkok-Tunisia dan Forum Kerjasama Tunisia-Tiongkok juga telah dibentuk untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara tetap solid.

Kemesraan hubungan Tunisia dengan Tiongkok semakin terlihat pada tahun 1996 dengan dibentuknya mekanisme konsultasi politik berkala oleh Kementerian Luar Negeri dari kedua negara (china.org.cn, 2016). Hal ini dibuktikan dengan kunjungan tingkat tinggi, pertukaran serta pengembangan kemitraan strategis antara Tiongkok dan Tunisia. Tunisia juga banyak berbagi pandangan bersama dengan Tiongkok tentang isu-isu internasional yang penting, dan terus bekerja sama serta saling mendukung dalam kepentingan internasional.

Selama lebih dari dua dekade, peran Tiongkok di negara-negara Maghreb seperti Algeria, Libya, Mauritania, Maroko, dan Tunisia telah meningkat. Secara umum, kehadiran Tiongkok di negara-negara Maghreb adalah untuk kepentingan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi (Zoubir, 2020). Tunisia sendiri menganggap Tiongkok sebagai aktor penting untuk menjadi investor dan sekaligus untuk mengimbangi ketergantungan Tunisia terhadap kekuatan Barat. Selain itu, persoalan investasi asing, kesenjangan infrastruktur, perdagangan, kemiskinan serta tantangan sosial adalah isu yang sedang dihadapi oleh Tunisia. Oleh karenanya, Tunisia menganggap Tiongkok sebagai mitra strategis yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Di satu sisi, kepentingan Tunisia dalam mengembangkan hubungan dengan Tiongkok tersebut juga bertepatan dengan pendekatan baru Beijing sendiri terhadap negara-negara Arab.

Bagi Tiongkok sendiri, Tunisia adalah mitra penting dalam mengejewantahkan kebijakan luar negerinya melalui instrumen *belt road initiative* (BRI). Urgensi Tunisia bagi Tiongkok terletak pada letak geografisnya yang strategis. Tujuan BRI Tiongkok untuk menghubungkan wilayah darat, laut, udara, dan dunia maya negara-negara di sepanjang rute baru Jalur Sutra salah satunya melibatkan peran Tunisia. Tunisia memiliki posisi strategis sebagai perantara untuk mengontrol jalur antara Afrika Utara dan Eropa.

**Gambar 1.1 Posisi Tunisia, Eropa, dan Afrika**



Sumber:

Keterlibatan Tiongkok yang relatif sukses dalam beberapa dekade terakhir dengan negara-negara berkembang disinyalir kuat disebabkan oleh pergeseran motif dalam hubungan internasional yang diambil. Awalnya, sekitar tahun 1949–1979, Tiongkok menitikberatkan hubungan internasionalnya berdasarkan pendekatan ideologi. Kemudian sejak reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mendasarkan hubungan internasionalnya menggunakan pendekatan kesepakatan komersial. Fenomena ini yang selanjutnya membuat negara-negara mitra Tiongkok dan Tunisia menjadi lebih tertarik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana artikulasi kebijakan luar negeri Tiongkok di Tunisia. Lebih dari itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis bagaimana dinamika Tiongkok di Afrika, khususnya di Tunisia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Artikulasi Kebijakan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan artikulasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan *output* apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Setidaknya, ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, pertama adalah manfaat praktis dan kedua adalah manfaat akademis.

### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah kajian hubungan internasional, khususnya isu yang berkenaan dengan artikulasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi tentang artikulasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan oleh aktor-aktor internasional lainnya ketika akan menjalin atau sedang menjalin hubungan bilateral maupun multilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

## **1.5. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan acuan dan rujukan peneliti untuk menggali dan memahami lebih dalam berkaitan dengan isu atau topik yang diangkat. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti adalah sebagai berikut,

- a. Artikel jurnal tentang “China’s Friendly Cooperative Relations with Tunisia in the Age of the New Silk Road Initiative” yang ditulis oleh Mordechai Chaziza. Artikel ini mengkaji tentang aspek-aspek yang melatarbelakangi hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Tunisia. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan Tiongkok dan Tunisia didasarkan pada kepentingan komersial bersama serta lokasi geografis Tunisia yang strategis, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan

pembangunan sosial Tunisia melalui integrasi dalam kerangka *the Belt and Road Initiative* (Chaziza, 2021).

- b. Artikel jurnal yang berjudul “Expanding Sino–Maghreb Relations Morocco and Tunisia” yang ditulis oleh Yahia H. Zoubir. Artikel ini membahas tentang dampak kehadiran Tiongkok di wilayah Maghreb yang menimbulkan kekhawatiran Barat. Kehadiran Tiongkok tersebut dibuktikan dengan terjalinnya hubungan bilateral dengan negara-negara Sino–Maghreb serta Forum Kerjasama China–Afrika (FOCAC) dan Forum Kerjasama Negara China–Arab (CASCF). Sejak peluncuran Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013, Tiongkok telah menunjukkan keseriusan yang kuat terhadap negara-negara Maghreb untuk menjadikannya sebagai pintu masuk ke pasar Eropa dan Afrika. Selain itu, masyarakat Maroko dan Tunisia dianggap memiliki sedikit pengetahuan tentang politik dan budaya Tiongkok. Selanjutnya, Tiongkok telah mencoba mengatasi kurangnya keakraban tersebut dengan mendirikan Institut Konfusius dan kegiatan budaya lainnya. Namun demikian, bahasa dan budaya masih menjadi hambatan jika dibandingkan dengan negara lain di Afrika (Zoubir, 2020).
- c. Artikel jurnal yang ditulis oleh Francois Lafargue yang berjudul “The economic presence of China in the Maghreb: Ambitions and Limits”. Artikel ini membahas tentang kehadiran Tiongkok di negara-negara Maghreb adalah untuk motif ekonomi. Sebelum awal tahun 2000-an, hubungan komersial negara-negara Sino Maghreb dan Tiongkok sangat terbatas, sebab kurangnya kecocokan dan pengaruh sejarah dan politik sekutu (seperti Prancis di Maroko, Italia di Tunisia atau Rusia di Aljazair). Dalam waktu kurang dari dua dekade, Tiongkok menjadikan dirinya sebagai mitra ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Maghreb meskipun pengaruhnya mengalami beberapa hambatan, seperti soliditas hubungan yang dipertahankan oleh negara-negara pantai selatan Mediterania dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, dan kecurigaan mereka terhadap Tiongkok yang dianggap memusuhi Islam (Lafargue, 2016).
- d. Artikel yang berjudul “China’s Strategy in North Africa: New economic challenges for the Mediterranean region” yang ditulis oleh Eugenia Pecoraro. Artikel ini mengkaji mengapa negara-negara Afrika Utara meningkatkan impor dari China dan mengapa China meningkatkan *foreign direct investments* di Afrika Utara. Bagi negara-negara Afrika Utara, hubungan kerjasama dengan China memiliki beberapa keuntungan seperti tidak adanya hambatan tarif dan lokasi geografis yang sangat bermanfaat sebagai poros Mediterania. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa aktor politik harus menyeimbangkan antara pembangunan berkelanjutan dan kepentingan ekonomi di

wilayah Afrika Utara (Pecoraro, *China's Strategy in North Africa: New economic challenges for the Mediterranean region*, 2010).

- e. Artikel yang ditulis oleh Zhen Yu yang berjudul “China’s Foreign Aid to the Middle East: History and Development”. Tulisan ini ingin menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu komponen penting diplomasi China dan Timur Tengah. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan sejarah bantuan Tiongkok ke negara-negara Timur Tengah melalui integrasi data penelitian dan analisis bentuk bantuan. Tulisan ini menemukan bahwa tim medis dari bantuan luar negeri yang dikirim China pada 1960-an dan tenaga kerja yang dikirim pada 1970-an terus berkembang ke berbagai negara seperti negara-negara Timur Tengah dan meluas ke wilayah lain. Pada awal abad ke-21, Tiongkok semakin memperkuat kerja sama teknologi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dengan negara-negara Timur Tengah. Terakhir, artikel ini menemukan bahwa terdapat kompleksitas peran negara-negara Timur Tengah dalam bantuan luar negeri dan perubahan akan kebutuhan bantuan yang disebabkan oleh kurangnya informasi di daerah terkait, jumlah total bantuan negara dan jumlah dana untuk setiap jenis bantuan, serta penyimpangan definisi 'bantuan' di dalam dan luar negeri, yang telah membatasi bantuan China ke Timur Tengah (Yu, 2020).

Tabel 1.1 Studi Pustaka

No	Identitas Jurnal	Temuan
1	Mordechai Chaziza, 2021  Judul: <i>China's Friendly Cooperative Relations with Tunisia in the Age of the New Silk Road Initiative</i>	Penelitian ini menemukan bahwa hubungan Tiongkok dan Tunisia didasarkan pada kepentingan komersial bersama serta lokasi geografis Tunisia yang strategis, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan sosial Tunisia melalui integrasi dalam kerangka <i>the Belt and Road Initiative</i>

2	<p>Yahia H. Zoubir, 2020</p> <p>Judul: <i>Expanding Sino–Maghreb Relations Morocco and Tunisia</i></p>	<p>Tiongkok telah menunjukkan keseriusan yang kuat terhadap negara-negara Maghreb untuk menjadikannya sebagai pintu masuk ke pasar Eropa dan Afrika sejak peluncuran <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) pada tahun 2013. Di satu sisi, masyarakat Maroko dan Tunisia dianggap memiliki sedikit pengetahuan tentang politik dan budaya Tiongkok. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, Tiongkok kemudian mendirikan Institut Konfusius dan kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Namun demikian, pendekatan <i>soft diplomacy</i> Tiongkok dianggap masih belum maksimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika.</p>
3	<p>Francois Lafargue, 2016</p> <p>Judul: <i>The economic presence of China in the Maghreb: Ambitions and Limits</i></p>	<p>Kehadiran Tiongkok di negara-negara Maghreb adalah untuk motif ekonomi. Sebelum awal tahun 2000-an, hubungan komersial negara-negara Sino Maghreb dan Tiongkok terbilang sangat minim, sebab kurangnya kecocokan dan pengaruh sejarah dan politik sekutu (seperti Prancis di Maroko, Italia di Tunisia atau Rusia di Aljazair). Dalam waktu kurang dari dua dekade, Tiongkok menjadikan dirinya sebagai mitra ekonomi yang sangat strategis oleh negara-negara Maghreb meskipun pengaruhnya mengalami beberapa hambatan, seperti soliditas hubungan yang dipertahankan oleh negara-negara pantai selatan Mediterania dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, dan kecurigaan mereka terhadap Tiongkok yang dianggap memusuhi Islam.</p>

4	<p>Eugenia Pecoraro, 2010</p> <p>Judul: <i>China's Strategy in North Africa: New economic challenges for the Mediterranean region</i></p>	<p>Di Afrika Utara, Tiongkok merupakan salah satu negara investor yang masih baru. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mencapai angka antara 6% dan 10% per tahun selama dua puluh tahun terakhir telah berdampak terhadap tingkat hubungan perdagangan dengan Afrika Utara dan Timur Tengah. Permintaan Tiongkok akan minyak, gas, dan sumber daya alam lain yang dibutuhkan adalah poin utama dari kemitraan baru dengan Afrika Utara. Namun demikian, China juga berkeinginan untuk memastikan keberadaan industri dan komersialnya di beberapa sektor yang belum dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Selain itu, kehadiran Tiongkok sebagai kekuatan baru untuk berkontribusi pada pengembangan kawasan dianggap telah menggantikan hegemoni laten perusahaan-perusahaan Amerika Utara dan Eropa.</p>
5	<p>Zhen Yu, 2020</p> <p>Judul: <i>China's Foreign Aid to the Middle East: History and Development</i></p>	<p>Bantuan luar negeri merupakan salah satu komponen penting diplomasi Tiongkok di Timur Tengah. Menurut Zhen Yu, terdapat kompleksitas perubahan akan kebutuhan bantuan dan peran negara-negara Timur Tengah dalam bantuan luar negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya jumlah bantuan dan jumlah dana untuk setiap jenis bantuan serta kejelasan informasi di daerah terkait. Selain itu, terdapat juga penyimpangan dari definisi 'bantuan' di dalam dan luar negeri sehingga Tiongkok membatasi bantuan luar negerinya ke Timur Tengah</p>

## 1.6. Kerangka Konseptual

### 1.6.1. Kebijakan Luar Negeri

Secara umum, kajian tentang kebijakan luar negeri didominasi oleh kajian-kajian yang berbasis pada kasus negara besar seperti Amerika Serikat yang mana dalam

tujuannya digunakan untuk memperoleh atau mengakumulasi kekuasaan (Cipto, 2005). Menurut Bambang Cipto, keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh kapasitas kebijakannya. Adapun indikator dari kapasitas kebijakan yang dimaksud di antaranya (a) mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus dengan sungguh-sungguh membangun konsensus nasional tentang tujuan dan cara mencapai tujuan, menekankan pemahaman sistematis dalam proses perumusan kebijakan serta menghindari keragu-raguan dan saling berkonflik dalam menjalankan kebijakan, (b) menekankan kesabaran dalam mencapai tujuan, (c) memandang negara-negara lain sebagai entitas yang tidak solid, dan (d) secara terus-menerus meningkatkan kapasitas kebijakan (Cipto, 2005).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999). Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu (Mas'ood, 1994). Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976). Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976). Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976). Secara spesifik, konsep ini digunakan untuk menganalisis artikulasi kebijakan luar negeri China di Tunisia.



### 1.6.2. Geoekonomi

Aspek geografi selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Geografi membentuk identitas, karakter, dan sejarah negara-bangsa (nation-states). Dalam hal lain, geografi juga dapat membantu kemajuan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (Kartini, 2015). Dalam hubungan internasional, geoekonomi dapat menjadi pijakan suatu aktor internasional dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Apalagi, pendekatan hubungan internasional saat ini banyak menggunakan instrumen-instrumen ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh China.

Secara historis, geoekonomi lahir dari dinamika konsep geopolitik. Geopolitik sendiri banyak berbicara tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi perilaku suatu negara. Dengan kata lain, aspek lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan kondisi fisik dapat menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan posisinya dalam hierarki negara. Namun dalam perkembangannya, konsep geopolitik mengalami tantangan. Pendekatan negara menggunakan konsep geopolitik banyak digantikan dengan pendekatan geoekonomi.

Konsep geoekonomi menjelaskan bagaimana meraih dan mempertahankan kepentingan nasional melalui alat atau cara ekonomi. Tidak seperti geopolitik, konsep geoekonomi lebih memfokuskan pada perkembangan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan fenomena globalisasi (Soilen, 2012). Konsep geoekonomi sangat relevan digunakan untuk menjelaskan urgensi Tunisia bagi kebijakan luar negeri Tiongkok. Sebab, secara geografis, Tunisia memiliki posisi yang strategis .

### 1.6.3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang dalam bahasa Prancis disebut *raison d'État* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, kepentingan nasional penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan praktik hubungan internasional. Machiaveli merupakan salah satu tokoh yang banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis tentang konsep kepentingan nasional. Argumen Machiaveli sering dipakai sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara untuk mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara selanjutnya digeser dari tatanan ketuhanan dan tunduk pada kebutuhan alamiahnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Hubungan *power* dan kepentingan nasional sangat erat. *Power* yang bersifat destruktif (hard power) dapat menjadi tujuan sekaligus instrumen dari kepentingan nasional. Ketika

kepentingan nasional digunakan untuk mengejar *power* (struggle for power) dan *power* digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya akan terjadi kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan (balance of power), konflik dan perang (Bainus & Rachman, 2018).

Sejak berakhirnya era kolonisasi (1960-an) dan Perang Dingin (1989), era baru telah memunculkan kekuasaan aktor non-negara, yaitu manusia secara individu maupun kolektif (komunitas atau institusi swasta) sebagai aktor baru dalam hubungan internasional. Alhasil, kepentingan nasional negara yang bersifat egois dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistik dan persuasif yang non-destruktif (*soft power*). Sebagai konsekuensi dari fenomena ini, keberadaan diplomasi *soft power* pada tingkat non-negara dan sub-negara menjadi sebuah keniscayaan (Bainus & Rachman, 2018).

Konsep kepentingan nasional pada dasarnya lahir dari tradisi pemikir realisme dalam hubungan internasional. Realisme menganggap bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang penting (unitary actor). Oleh karena sistem internasional yang anarki, maka negara harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup (self-help). Berangkat dari asumsi tersebut maka lahirlah konsep kepentingan nasional. Dimana negara dituntut untuk mencapai segala kepentingan demi menjaga eksistensinya dalam sistem internasional yang anarki (Burchill, 2005).

Clinton beranggapan bahwa kepentingan nasional dapat dipahami dalam dua aspek yang berbeda. Pertama, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai wujud kepentingan dari komunitas masyarakat. Perspektif ini melihat bahwa masyarakat dalam suatu negara sebagai komunitas yang saling berbagi nilai-nilai yang sama. Komunitas yang saling menghargai, menghormati serta mengikat pada setiap anggota komunitas masyarakat. Maka dalam hal ini, kepentingan nasional dilihat sebagai cerminan kepentingan masyarakat. Kedua, kepentingan nasional pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip diplomasi yang saling mendukung untuk terciptanya kebaikan bersama antar aktor nasional yang lain. Dengan kata lain, kepentingan nasional bisa diartikan sebagai keinginan negara dalam mencapai tujuan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya (Fartianur, 2018).

Berbeda dengan Clinton, Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman bagi setiap pemangku kebijakan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Adapun elemen-elemen yang dimaksud meliputi kedaulatan (sovereignty), kemerdekaan

(independence), keutuhan wilayah (territorial integrity), keamanan militer (military security) dan kesejahteraan ekonomi (economic well-being) (Plano & Olton, 1999).

Sedangkan Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan upaya mengejar kekuasaan, yaitu upaya apa saja yang dapat mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Selanjutnya hubungan kekuasaan dan pengendalian yang dimaksud dapat diciptakan melalui mekanisme kerjasama maupun paksaan (Mas'oed, 1990).

Dari beberapa keterangan diatas dapat dipahami bahwa masih belum ada pengertian pasti mengenai konsep kepentingan nasional. Para penstudi hubungan internasional memiliki kecenderungan tersendiri dalam menentukan pengertian dari konsep kepentingan nasional. Bahkan Vandana dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional sebenarnya sudah dibahas selama tiga abad lamanya. Konsep kepentingan sebatas dimaknai sebagai alat analisis dan instrumen dari tindakan politik (Revilia, 2020). Banyak sekali buku-buku dalam studi hubungan internasional yang membahas mengenai konsep kepentingan nasional. Beberapa diantaranya adalah pakar hubungan internasional yang terkenal seperti Charles Beard, Hans. J. Morgenthau, Joseph Frankel, dll. Namun demikian, masih belum dapat dirumuskan satu kesepakatan tunggal tentang definisi konsep kepentingan nasional (Kartika Putri, 2021).

Di satu sisi, Donald. E. Nuchterlein memberikan penjelasan yang lebih praktis dan mudah dipahami tentang konsep kepentingan nasional. Bagi Nuchterlein, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepekaan dalam mengetahui kebutuhan dari suatu negara yang berdaulat dimana kebutuhan tersebut terletak di negara lain dan di luar lingkungan negara tersebut (Nuchterlein, 1976). Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa kepentingan nasional inilah yang akhirnya mendorong negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri dalam upaya untuk mencapai kepentingan yang diinginkan. Oleh karenanya, suatu proses kebijakan luar negeri akan sejalan dan beriringan dengan kepentingan nasional suatu negara. Lebih lanjut Nuchterlein menjelaskan bahwa kepentingan nasional dapat dibagi ke dalam empat komponen utama, yaitu:

- a) Defence Interest. Secara mendasar, kepentingan nasional suatu negara dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara beserta rakyatnya dari semua ancaman yang berasal dari pihak luar. Bentuk ancaman dalam konteks ini adalah ancaman yang berupa ancaman kekerasan fisik (physical violence) yang

ditimbulkan oleh negara lain. Defence interest juga dapat dipahami sebagai terbebasnya satu negara atau aktor internasional dari campur tangan negara lain. Dalam konteks ini, ancaman yang dimaksud dianggap mengganggu jalannya pemerintahan sehingga negara perlu mengambil keputusan untuk menghilangkan ancaman tersebut.

- b) Economic Interest. Dalam konteks ini, kepentingan nasional ditujukan untuk upaya peningkatan kapabilitas ekonomi negara yang mana hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana negara menjalin hubungan dengan negara lain.
- c) World Order. Dalam hal ini, kepentingan nasional bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem politik dan ekonomi internasional sehingga dalam ranah internal negara dapat merasakan keamanan dan kenyamanan. Ketika keamanan dapat diwujudkan maka rakyat bisa terhindar dari berbagai ancaman. Dalam hal ini kepentingan negara dapat menyesuaikan dengan kepentingan dunia internasional.
- d) Ideological interest. Kepentingan nasional dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu negara. Nilai-nilai yang dimaksud dapat berupa agama, kepercayaan, ideologi, norma, dan nilai-nilai keluhuran yang dianggap baik oleh masyarakat dalam negara tersebut.



**Gambar 1.2 Kepentingan Nasional**

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa empat komponen utama kepentingan nasional inilah yang mempengaruhi perilaku negara dan sekaligus menjadi pondasi awal bagi negara untuk memperoleh kepentingan nasionalnya. Oleh karena, kebijakan luar negeri selalu *in line* dengan kepentingan nasional, konsep kepentingan nasional dapat juga digunakan sebagai pijakan untuk melihat kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia secara kongkrit.

### **1.7. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari hasil tinjauan pustaka (*library research*) yang dianalisis dan dikutip dari berbagai sumber seperti buku-buku, literatur, jurnal ilmiah atau hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, majalah, surat kabar internet serta media lembaga terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.8. Hipotesis**

Penelitian ini menarik sebuah hipotesa bahwa implementasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia menggunakan mekanisme atau instrumen sebagai berikut:

- a) Instrumen *Belt and Road Initiatives* (BRI). Dalam hal ini, Tiongkok mencoba menghubungkan, melakukan koordinasi kebijakan dan melakukan penguatan informasi aktifitas ekonomi dan politiknya dengan pemerintah Tunisia.
- b) Mekanisme kerjasama multilateral melalui *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC). Kerjasama integrasi kawasan FOCAC digunakan Tiongkok untuk mengkonsolidasikan kebijakan luar negerinya dengan negara-negara anggota khususnya Tunisia.
- c) Mekanisme kerjasama bilateral. Pendekatan kerjasama bilateral digunakan oleh Tiongkok untuk dapat lebih intensif menjalin kerjasama dengan Tunisia.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam Tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan dari sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka konseptual, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN DINAMIKA *DECISION MAKING* REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Pada bab ini, penulis menguraikan secara umum kebijakan luar negeri dan dinamika pengambilan keputusan (*decision making*) Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Untuk melihat kebijakan luar negeri Tiongkok secara komprehensif, perlu kiranya untuk memahami apa yang memandu kebijakan luar negeri, mengapa demikian, dan bagaimana pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Tiongkok itu dilakukan.

## **BAB III URGENSITAS TUNISIA DAN DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT) DI TUNISIA**

Pada bab ini, penulis menguraikan urgensi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tunisia. Urgensi Tunisia bagi kebijakan luar negeri Tiongkok dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh Tunisia secara umum seperti potensi infrastruktur, sumber daya alam, lahan, dan ketersediaan air. Indikator kedua adalah potensi khusus yang dimiliki oleh Tunisia yaitu letak geografis yang strategis. Tunisia menjadi titik strategis penghubung perdagangan jalur laut Tiongkok dari Afrika Utara ke Eropa dan negara-negara di benua Afrika lainnya. Selain itu, bab ini juga memberikan deskripsi bagaimana persaingan Tiongkok di Afrika dan Tunisia dengan aktor-aktor internasional lainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

## **BAB IV KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT) DI TUNISIA DITINJAU DARI KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL**

Pada bab ini, penulis menguraikan bagaimana Tiongkok mewujudkan kebijakan luar negerinya di Tunisia. Dalam bab ini, setidaknya terdapat tiga mekanisme atau instrumen yang digunakan oleh Tiongkok yaitu instrumen *Belt and Road Initiatives* (BRI), mekanisme kerjasama bilateral dan mekanisme kerjasama multilateral melalui *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC). Melalui BRI, Tiongkok mencoba menghubungkan, melakukan koordinasi kebijakan dan melakukan penguatan informasi aktifitas ekonomi dan politiknya di Tunisia

dengan negara-negara Afrika dan Eropa. Instrumen kerjasama multilateral FOCAC digunakan Tiongkok untuk mengkonsolidasikan kebijakan luar negerinya dengan negara-negara anggota. Pendekatan kerjasama bilateral digunakan oleh Tiongkok untuk dapat lebih intensif menjalin kerjasama dengan Tunisia.

## **BAB V**

## **KESIMPULAN**